

Revitalisasi Format Data Monografi Desa Alu melalui Kegiatan Pendampingan Aparatur Desa

Rahmah Abubakar^{1*}, Retno Mayapada¹, Kadi¹, Rahmat Fajar, St. Tenri Cici¹, Nilawati¹, Hasma Sulaiman¹

¹Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

*Correspondence: rahmahabubakar@unsulbar.ac.id

ABSTRACT

Village monograph data is essential for supporting the government in policymaking and monitoring the socio-economic conditions of communities, especially in achieving sustainable development goals. However, in many villages, including Alu Village in Polewali Mandar Regency, the available monograph data is incomplete, lacks accuracy, and is not updated regularly. Observations revealed that the last monograph data update for Alu Village was in 2016, and it does not yet comply with the latest regulation, Permendagri Number 13 of 2012. This situation limits the village's ability to obtain reliable data for development planning. Therefore, periodic updates and improvements are needed so that the village has comprehensive and accurate information as a foundation for more effective development. This community service aims to assist and develop a monograph data format for Alu Village. The activity was conducted in collaboration with the Alu Village Government and involved 15 village officials. The implementation utilized individual and classical approaches, applied during the presentation of village monograph compilation materials. The outcome of this community service is a village monograph data format aligned with the latest government regulations.

Keywords: Data Format; Village Monograph; Village Official Training;

ABSTRAK

Data monografi desa merupakan hal yang penting untuk mendukung pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan pemantauan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun di banyak desa, termasuk Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar, data monografi yang tersedia tidak lengkap, kurang akurat, dan tidak diperbarui secara berkala. Berdasarkan hasil pengamatan, pembaruan data monografi Desa Alu terakhir kali dilakukan pada tahun 2016 dan belum sesuai dengan aturan terbaru, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2012. Kondisi ini menyebabkan desa tidak dapat memperoleh data yang akurat untuk perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pembaruan dan perbaikan secara berkala diperlukan agar desa memiliki informasi yang lengkap dan akurat sebagai landasan pembangunan yang lebih efektif. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu dan menyusun format data monografi Desa Alu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Alu dan melibatkan 15 perangkat desa. Pelaksanaannya menggunakan pendekatan individual dan klasikal, yang diterapkan pada saat penyampaian materi penyusunan monografi desa. Luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah format data monografi desa yang sesuai dengan ketentuan pemerintah terbaru.

Kata Kunci: Format Data; Monografi Desa; Pelatihan Perangkat Desa

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Demografi kependudukan merupakan salah satu elemen krusial dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia. Data kependudukan berfungsi sebagai landasan strategis yang mendukung proses

perencanaan, implementasi, serta evaluasi program-program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi langkah esensial dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai tujuan pembangunan (Hastuti, 2020; Sitorus & Hutasoit, 2021; Adam et al., 2019; Wathani, 2023).

Data demografi penduduk merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan kondisi penduduk di suatu wilayah tertentu sebagai perencanaan pembangunan nasional. Pencatatan jumlah penduduk dilakukan melalui registrasi yang memuat informasi penting secara berkelanjutan (Puspitasari & Sitohang, 2023). Data ini bertujuan melindungi dan mengakui status pribadi serta status hukum warga, sehingga akses data ini dibatasi dan memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Hak akses ini terbatas bagi instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga resmi lainnya termasuk organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab meningkatkan layanan mereka (Agustina & Hariyoko, 2024; Wahyuni et al., 2017; Andriansyah, 2021; Pratama, 2023).

Penggunaan data kependudukan diatur melalui Permendagri No. 102 Tahun 2019. Data tersebut berfungsi untuk mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menerapkan kebijakan penggunaan data secara terpadu, atau yang dikenal sebagai kebijakan *one data policy*, yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui kebijakan otonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi dalam mengelola urusan mereka sendiri. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, dengan pertimbangan yang berdasarkan data yang dikelola sesuai dengan kebijakan daerah tersebut (Agustina & Hariyoko, 2024).

Secara umum, dinamika pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kejadian kelahiran menyebabkan penambahan jumlah penduduk, sementara kejadian kematian mengakibatkan penurunan jumlah penduduk, sementara faktor migrasi dapat memberikan pengaruh yang berbeda, tergantung pada selisih antara penduduk yang masuk dan keluar dari suatu daerah (Harmadi, 2021; Eridiana, 2012). Faktor-faktor ini penting digunakan dalam menganalisis perkembangan sosial ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, perubahan komposisi penduduk perlu diamati secara rutin.

Penyediaan informasi dan perubahan data merupakan kebutuhan penting dalam pengambilan keputusan terlebih pada pemerintahan. Komponen pemerintahan bahkan sampai level desa/kelurahan pun tak boleh tertinggal dalam hal ini. Ketersediaan data desa dapat memberikan gambaran awal keadaan dan potensi desa (Devi & Hidayati, 2020; Kemendagri, 2007). Informasi ini sebagai indikasi awal tentang potensi nyata wilayah, fasilitas dan infrastruktur serta kondisi sosial budaya dan ekonomi di setiap desa (Supratiawan, 2014). Diharapkan demografi kependudukan dapat tersedia dan mudah diakses khususnya untuk pimpinan daerah dan umumnya pada masyarakat luas. Sedang realitanya proses pemutakhiran data tidak terlaksana, akibatnya ketersediaan data terbatas dan lawas (Harjanti, 2020).

Penyediaan dan penerbitan data mutakhir di setiap desa perlu dilaksanakan dengan optimal. Ketersediaan data yang valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan komponen penting dalam merancang merancang program pembangunan serta pemberdayaan Masyarakat (Prihatmaji dkk., 2013; Astuti dkk., 2020; Rahmawati & Rasyid, 2022). Trimurni dkk. (2023) dalam kajiannya menyatakan bahwa dalam upaya pemutakhiran data monografi desa diperlukan program peningkatan kapasitas aparatur dan warga berupa

pelatihan penyusunan monografi desa yang dilaksanakan oleh institusi perguruan tinggi, pemerintah daerah/nasional dan lembaga lainnya.

Data monografi merupakan informasi dasar tentang kondisi penduduk yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Data ini memudahkan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Data monografi juga berperan dalam memantau kesejahteraan penduduk dan memberikan gambaran kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada waktu tertentu. Namun, keterbatasan data dan kurangnya validitas informasi terhadap data monografi seringkali dijumpai terutama di daerah pedesaan. Padahal, data di tingkat desa merupakan data dasar yang menjadi acuan untuk data kependudukan di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan mendukung pembangunan desa agar lebih efektif, salah satunya dengan menyediakan data monografi yang terbaru dan akurat (Dwiharto, 2021).

Beberapa kajian telah dilakukan untuk membahas penyusunan data monografi desa, diantaranya seperti yang dilakukan Neovani dan Sjaf (2022), Prabawati, dkk. (2023), Fathurohman dan Erdi (2022), Suhermanto, dkk. (2021), Amane (2016), Hasanah, dkk. (2021), dan Khairiyati, dkk. (2020). Neovani dan Sjaf (2022) mengkaji metode penyusunan data monografi desa secara konvensional dan presisi. Sementara itu, Prabawati, dkk. (2023) dan Fathurohman dan Erdi (2022) dalam penelitiannya mengembangkan sistem informasi dan digitalisasi data monografi desa. Adapun Suhermanto, dkk. (2021) dan Amane (2016) melakukan pelatihan branding profil desa memanfaatkan data demografi desa. Pengembangan UMKM ibu-ibu desa dengan melihat potensi dari data monografi pun juga dilakukan oleh Hasanah dkk. (2021). Namun, ketersediaan data demografi tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal desa, namun juga bermanfaat bagi berbagai pihak, salah satunya seperti dalam kajian yang dilakukan oleh Khairiyati, dkk. (2020) yang memanfaatkan data demografi untuk memetakan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa.

Desa Alu merupakan salah satu desa dari tujuh desa/kelurahan di kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasi data monografi di desa Alu perlu disediakan secara optimal. Hal dasar yang menjadi latar belakang dari belum tersedianya data monografi yang akurat dan mutakhir di Desa Alu adalah belum tersedianya format baku untuk penyusunan data monografi di Desa Alu. Penyusunan data monografi desa perlu menyesuaikan aturan terbaru oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan penyusunan format data monografi yang terbaru di Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 15 orang peserta yang merupakan aparat Desa Alu, ketua RT dan dusun di Desa Alu, serta perwakilan BPD Desa Alu. Kegiatan ini dimulai dengan tahapan komunikasi dengan mitra (Desa Alu) untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta menjelaskan solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan diskusi untuk menyepakati jadwal pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan pendampingan serta menyusun materi yang berisikan informasi mengenai data monografi desa. Terakhir, tahap pelaksanaan pendampingan dan penyusunan format data untuk Desa Alu.

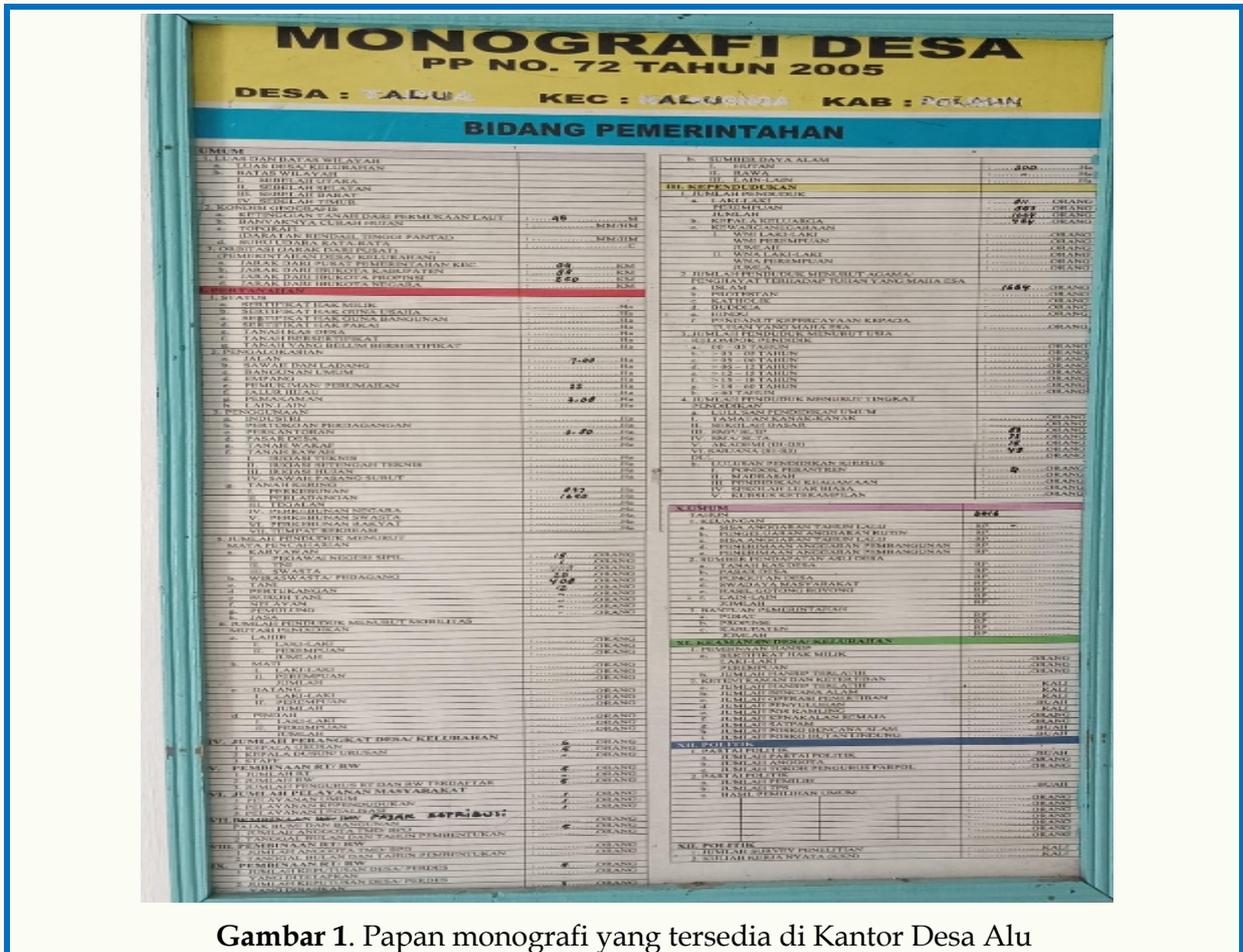
3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pendampingan dan penyusunan data monografi Desa Alu di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan (*softskill*) perangkat Desa Alu dalam menyusun data monografi desa. Dari kegiatan pelatihan ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada aparat desa di Desa Alu tentang pentingnya pemanfaatan data monografi untuk pembangunan desa, sehingga pengetahuan yang telah diperoleh dapat membantu pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dibidang kependudukan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pelaksanaan pendampingan dan penyusunan data monografi di Desa Alu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023. Finalisasi format data dilakukan pada tanggal 26 November 2023 dan dilakukan penyerahan papan monografi kepada pihak Desa Alu secara langsung. Kegiatan pendampingan ini terlaksana dengan baik dan berjalan lancar.

3.1 Identifikasi Masalah dan Penyelesaiannya dengan Mitra

Kunjungan dan observasi awal ke mitra yaitu Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023. Dalam kegiatan ini, diperoleh informasi bahwa Desa Alu belum memiliki informasi data monografi desa yang sesuai dengan peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa Dan Kelurahan. Di kantor desa, ditemukan papan monografi desa yang terakhir kali diperbarui pada tahun 2016 dengan format data mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.



Gambar 1. Papan monografi yang tersedia di Kantor Desa Alu

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023, di kantor Desa Alu terpajang papan monografi desa yang terlihat pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan papan yang berisikan data monografi Desa Alu yang diperbarui terakhir kali pada tahun 2016. Data monografi tersebut juga masih menggunakan format data yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang saat ini sudah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah yang terbaru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan.

Data monografi desa tidak dibahas secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Regulasi ini lebih berfokus pada pengaturan pemerintahan desa, kewenangan, keuangan desa, serta hubungan antara pemerintah daerah dan desa. PP ini memberi landasan bagi pengaturan yang lebih spesifik di tingkat desa dan menjadi pedoman dasar bagi desa dalam menjalankan pemerintahan lokal yang mandiri serta otonom sesuai sistem pemerintahan Indonesia.

Sementara itu, data monografi desa baru diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan, yang lebih khusus mengatur tujuan, metode pencatatan, dan penggunaan data monografi untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Permendagri ini mengatur monografi desa dan kelurahan yang mencakup rincian informasi demografi, geografi, sosial, dan ekonomi secara lebih terperinci untuk setiap desa atau kelurahan. Sehingga, regulasi ini mengatur monografi desa dan kelurahan yang meliputi data kependudukan, infrastruktur, kondisi lingkungan, serta aspek sosial budaya yang lebih detail dibandingkan cakupan di PP Nomor 72 Tahun 2005. Data monografi dalam peraturan ini dirancang untuk membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan lokal serta menargetkan program-program sesuai dengan karakteristik desa atau kelurahan. Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 memberikan panduan teknis untuk pengumpulan data desa dan kelurahan secara komprehensif, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memberikan pedoman umum dalam pengelolaan desa sebagai bagian dari otonomi daerah dan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, papan monografi pada Gambar 1 menjadi salah satu indikator perlunya pembaruan data monografi desa untuk meningkatkan keakuratan dan relevansi informasi di Desa Alu. Pembaruan papan monografi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat penting untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa yang lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut, program pendampingan menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk membantu Desa Alu menyusun format data monografi sesuai dengan regulasi terbaru.

3.2 Penyusunan Format Data Monografi Desa

Secara umum, pendampingan dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan materi pelatihan terkait data monografi desa sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Selain itu, juga diberikan pengenalan terhadap peserta terkait Permendagri No. 13 Tahun 2012. Selanjutnya dilakukan diskusi lanjut dengan aparat Desa Alu berkaitan dengan data-data yang perlu dikumpulkan oleh pihak desa yang nantinya akan digunakan untuk mengisi format data monografi desa yang akan disusun, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Tim memberikan materi terkait data monografi desa.

Pada Gambar 2, terlihat tim sedang menyampaikan materi kepada aparat Desa Alu mengenai penyusunan data monografi desa. Materi diawali dengan menyampaikan kepada aparat desa bahwa data desa dapat diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya adalah monografi desa. Selanjutnya, tim memberikan pengenalan dasar tentang data monografi dan pentingnya data tersebut. Setelah itu, materi dilanjutkan dengan penjelasan tentang Permendagri No. 13 Tahun 2012 sebagai pedoman utama dalam format penyusunan data monografi desa yang terbaru. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman aparat desa dalam menyusun data monografi desa secara sistematis dan sesuai aturan yang berlaku.



Gambar 3. Tim memberikan pendampingan dan penyusunan format monografi desa

Gambar 3 memperlihatkan proses pendampingan yang dilakukan tim kepada aparat Desa Alu dalam merancang format data monografi desa. Pada tahap ini, peserta tidak hanya menerima teori, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi data yang diperlukan, seperti informasi geografis, demografi, dan potensi lokal. Diskusi mendalam dilakukan untuk memastikan format yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga selaras dengan kebutuhan khusus Desa Alu. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali aparat desa dapat memperbarui data monografi desa secara mandiri di masa depan.

Secara umum, monografi dapat diartikan sebagai kumpulan data statistik yang mencakup berbagai bidang, dimulai dari kondisi geografis suatu wilayah, sumber daya alam,

pemerintahan, pendidikan, ekonomi hingga sumber daya manusia. Monografi berfungsi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang wilayah tersebut dan digunakan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari nasional hingga tingkat desa (Ardi, 2010). Secara praktis, monografi desa sering diwujudkan dalam bentuk profil desa, yang menyediakan deskripsi lengkap tentang karakteristik desa dan kelurahan.

Profil desa mencakup data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, manusia, kelembagaan, fasilitas, dan perkembangan serta tantangan yang dihadapi oleh desa atau kelurahan (Al Zahra dkk., 2023). Profil desa dan kelurahan ini diharapkan menjadi sumber informasi tentang potensi wilayah tersebut. Sehingga, data profil perlu tersedia secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana ketersediaan dan akurasi data menjadi tolok ukur kualitas data profil tersebut (Achsini, dkk., 2015). Profil desa dan kelurahan diperlukan sebagai gambaran potensi dan perkembangan desa yang akurat dan terintegrasi, sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Kelurahan (Trimurni, dkk., 2023), sementara itu untuk monografi desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan.

Desa Alu sebelumnya telah memiliki Monografi Desa yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun, data monografi yang ada belum tersusun dengan baik, kurang lengkap dan akurat, dan data tidak diperbarui secara berkala sehingga belum dapat berfungsi secara optimal sebagai basis data untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan desa yang berkelanjutan (Trimurni, dkk., 2023). Data dalam monografi desa seharusnya mencakup informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu, dan komprehensif sehingga mampu memberikan pandangan menyeluruh terhadap berbagai isu yang ada (Hastuti, 2020).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis untuk penyusunan dan pemanfaatan data monografi yang mencakup profil desa dan kelurahan, yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Tujuan utama dari peraturan ini adalah tersedianya data yang valid dan lengkap untuk membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam perencanaan pembangunan, pengawasan, dan pelayanan masyarakat. Data ini berperan penting dalam evaluasi kinerja serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah setempat.

Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pemutakhiran data monografi secara berkala agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah. Setiap pemerintah desa atau kelurahan diharapkan untuk menyusun data monografi sesuai dengan format dan prosedur yang telah diatur, guna memudahkan koordinasi dan sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Selain mengatur mengenai penyusunan dan pemutakhiran data, Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 juga menetapkan peran aktif kepala desa, perangkat desa, dan unsur masyarakat dalam proses pengumpulan data monografi. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Data monografi yang disusun sesuai pedoman ini berfungsi sebagai dasar kebijakan pembangunan, sehingga data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang direncanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

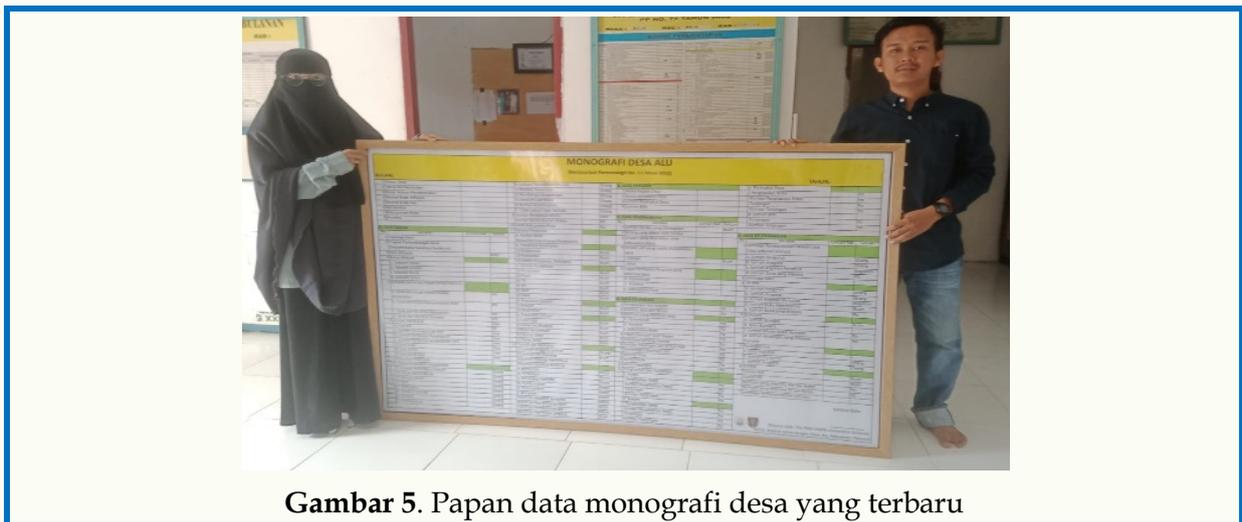
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2012, monografi desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Monografi desa memuat tentang data umum,

pasar desa), serta data terkait ketertiban dan bencana, seperti jumlah anggota Linmas, pos kamling, kejadian kriminal, kejadian bencana, pos bencana alam, pembalakan liar, dan pos hutan lindung.

Sementara itu, data personil desa mencakup nama kepala desa, nama sekretaris desa, jumlah perangkat desa, dan jumlah anggota BPD. Selanjutnya, data kewenangan desa mencakup jumlah peraturan desa (Perdes) yang ditetapkan, bidang yang diatur oleh Perdes, serta urusan yang diserahkan oleh kabupaten/kota. Selain itu, informasi mengenai urusan asli yang masih dilaksanakan desa, dengan rincian jumlah dan jenis urusan tersebut juga dimasukkan. Data lainnya mencakup tugas pembantu program yang diterima desa, yang berasal dari pemerintah, provinsi, serta kabupaten/kota.

Informasi selanjutnya berupa data keuangan desa. Data keuangan desa mencakup berbagai informasi terkait pendapatan dan pengeluaran desa, antara lain pendapatan asli daerah, besaran ADD per tahun, serta bantuan yang diterima dari pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, data sumber bantuan untuk desa seperti melalui hibah, bantuan luar negeri, swadaya atau gotong-royong, serta sumber keuangan lain di luar PBB dan sumbangan/bantuan lainnya juga dimasukkan. Data keuangan desa juga mencakup anggaran belanja desa, SILPA/SIKPA, dana cadangan yang tersedia, serta penghasilan dan tunjangan bagi perangkat desa.

Terakhir, data kelembagaan desa yang mencakup berbagai data lembaga yang ada di desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan TP PKK yang berisikan informasi seperti jumlah pengurus, anggota, jumlah kegiatan dan dana yang dikelola. Selain itu, terdapat informasi mengenai lembaga adat, serta BUMDes, Karangtaruna, RT/RW dan bantuan yang diterima per bulan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.



Gambar 5. Papan data monografi desa yang terbaru

Gambar 5 menunjukkan luaran dari kegiatan ini berupa papan data monografi Desa Alu yang baru. Papan ini berisikan format data monografi untuk menggantikan versi lama yang sudah tidak sesuai dengan regulasi terbaru. Selain berfungsi sebagai sarana penyajian data secara visual, papan ini juga mendukung transparansi publik dan perencanaan pembangunan desa. Dengan format data monografi yang baru, aparat desa dapat memperbarui serta memanfaatkan data dengan lebih efisien untuk berbagai keperluan administratif dan strategis.

4. Kesimpulan

Data monografi desa merupakan salah satu hal yang penting untuk membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dan memantau kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun begitu, di banyak

desa, termasuk Desa Alu di Kabupaten Polewali Mandar, data monografi yang tersedia tidak lengkap, kurang akurat, dan tidak diperbarui secara berkala. Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa data monografi Desa Alu terakhir diperbarui pada tahun 2016 dan belum sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2012. Kondisi ini menghambat desa dalam memperoleh data yang andal untuk perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa desa memiliki informasi yang lengkap dan akurat sebagai dasar pembangunan yang lebih efektif.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan melakukan penyusunan format data monografi Desa Alu sebagai bentuk keterbukaan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Kegiatan diharapkan tidak hanya dilakukan untuk aparat desa pada satu kelurahan saja tetapi dapat melibatkan aparat desa dari kelurahan yang lain, terutama yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Luaran dari pengabdian masyarakat ini adalah tersedianya format data monografi desa sesuai dengan aturan pemerintah yang terbaru, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2012.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada DIPA Universitas Sulawesi Barat yang telah menyediakan dana hibah untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sangat berharga dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan dan partisipasi dari semua pihak telah memungkinkan kami untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas data monografi desa.

Daftar Pustaka

- Achsin, S. N., Cangara, H., & Unde, A. A. (2015). Profil desa dan kelurahan sebagai sumber informasi: Studi evaluasi tentang penyediaan informasi potensi desa dan kelurahan di Sulawesi Selatan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Memerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan. *Komunikasi KAREBA*, 4(4), 449-467. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/649>
- Adam, L., Munawar, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1(2), 144-164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Agustina, N. G. V., & Hariyoko, Y. (2024). Pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan Kelurahan Kedung Baruk. *Policy and Maritime Review*, 3(1), 1-12. <https://pmr.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/55>
- Al Zahra, P. N., Maulida, N. K., Rahmawassti, E. N., Susetyo, A. M., Arifin, A. F., & Audin, B. M. N. (2023). Pelatihan dan pembuatan website profil Desa Karanglo Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1), 38-45. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jpi/article/view/2089>
- Amane, A. P. O. (2016). Pendampingan penyusunan profil Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(2), 1-23. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/2054>
- Andriansyah, A. (2021). Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. *Jurnal Syntax Transformation*,

- 2(4), 422–432. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.262>
- Ardi, F. (2010). Analisa dan perancangan sistem monografi kependudukan pada e-government Kabupaten Tangerang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. UIN Jakarta Repository. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/710>
- Astuti, K. D., Pangi, P., Yesiana, R., Anggraini, P., & Septiarani, B. (2020). Profil desa sebagai dasar perencanaan dan pembangunan Desa Tanon. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(4), 215–225. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/8598>
- Devi, L. Y., & Hidayati, W. (2020). Pembuatan profil Desa Gerbosari. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 445–454. <https://doi.org/10.22146/jp2m.51195>
- Dwiharto, K. N. (2021, August 11). Mahasiswa KKN Undip lakukan visualisasi monografi desa dalam bentuk infografis sebagai langkah awal wujudkan SDG's. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com>
- Fathurohman, F., & Erdi, E. (2022). Sistem informasi desa untuk komunikasi pembangunan yang lebih baik. *DST*, 2(2), 126–133. <https://doi.org/10.47709/dst.v2i2.1575>
- Harjanti, I. M. (2020). Penyusunan profil desa sebagai upaya pembaruan data di Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. *Pengabdian Vokasi*, 1(3), 211–214. <https://doi.org/10.14710/jpv.2020.7324>
- Harmadi. (2021). Pengantar demografi. In *Analisis data demografi* (pp. 1–48).
- Hasanah, T., Markus, Jalaludin, Saparudin, & Hartini, I. (2021). Pemberdayaan kewirausahaan ibu-ibu Desa Talang Tangsi melalui pelatihan pembuatan berbagai olahan ubi singkong di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Krida Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 1–6. <http://kridacendekia.com/index.php/jkc/article/view/40>
- Hastuti, S. H. D. (2020). Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital. *Teknimedia: Teknologi Informasi dan Multimedia*, 1(1), 18–21. <https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9>
- Khairiyati, E. D., Nasution, M. I. P., & Ikhwan, A. (2020). Pemetaan akurat lokasi kerja nyata dengan data monografi desa. *Jurnal Teknologi Informasi*, 4(1), 7–12. <https://doi.org/10.36294/jurti.v4i1.1299>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Neovani, N., & Sjaf, S. (2021). Membanding monografi desa konvensional dengan monografi desa presisi (Kasus: Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(6), 715–741. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i06.913>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Prabawati, I., Pradana, G. W., Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., Epriyanto, D. F., & Tolentino, T. de A. (2023). The development of village data and information management through the innovation diffusion. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 566–590. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p566-590>

- Prihatmaji, Y. P., Adi, W. P., & Zubhata, V. (2013). Pembuatan profilisasi dusun. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 2(1), 14-19. Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/download/7841/6853/14565>
- Puspitasari, N., & Sitohang, F. K. S. (2023). Pengolahan data demografi penduduk menggunakan Microsoft Excel di Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(3), 181-190. <https://doi.org/10.33366/japi.v7i3.3774>
- Rahmawati, D. E., & Rasyid, H. A. N. (2022). Pendampingan penyusunan buku profil desa. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 3, Article 1. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i>
- Sitorus, M., & Hutasoit, E. (2021). Upaya menekan permasalahan kependudukan di masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan nonformal. *Research and Development Journal of Education*, 7(2), 474. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10565>
- Suhermanto, D. F., Sugiharto, M. A., & Mas'udi, S. Y. F. (2021). Pelatihan dan pendampingan pembuatan profil desa sebagai sarana branding desa wisata Pujon Kidul. *Community Empowerment*, 6(5), 843-848. <https://doi.org/10.31603/ce.4530>
- Supratiawan, A. (2014). Kemampuan perangkat desa dalam menyusun profil potensi desa. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 283-291. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.283-291>
- Trimurni, F., Sihombing, S. M., & Saraan, M. I. K. (2023). Monografi desa dan sustainabilitas pembangunan: Studi kasus pada Desa Swadaya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. *Journal of Human and Education*, 3(2), 1-11. Retrieved from <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/download/136/73/419>
- Wahyuni, N., Akib, H., & Darwis, M. (2017). Keefektifan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v7i1.3434>
- Wathani, M. (2023). Rancang bangun aplikasi administrasi kependudukan online Barito Kuala (Studi kasus: Disdukcapil Kota Marabahan). *Technologia Jurnal Ilmiah*, 14(4), 354. <https://doi.org/10.31602/tji.v14i4.11000>